

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Portugal sebelum terjadinya kudeta militer 25 April 1974 adalah suatu negara Republik dengan pemerintahannya yang bersifat otoriter, fasistis dan tidak demokratis, Portugal sebagai kolonialis Eropa termasuk kolonialis tertua dan juga merupakan kolonialis yang paling terakhir melepaskan kolonial-kolonialnya (Soekanto, 1976: 25). Sampai tahun 1951 negara jajahan Portugal di Asia dan Afrika secara resmi memiliki status koloni dan ditempatkan di bawah menteri koloni-koloninya yang menetapkan garis besar pemerintahannya yang dijadikan propinsi dan diberi otonomi terbatas, akan tetapi dalam kenyataannya pemerintahan Portugal menganggap sepi aspirasi kemerdekaan rakyat Afrika dan berusaha menumpas gerakan-gerakan kemerdekaan dan negara-negara tersebut dapat dianggap masih tetap sebagai negara jajahan dan koloni sehingga negara jajahan Portugal di Afrika berpendapat agar memberikan kemerdekaan kepada negaranya (Soekanto, 1976: 27).

Dalam bukunya yang berjudul *Funu Perjuangan Timor Lorosae Belum Selesai*. Horta (1998: 26) mengungkapkan bahwa “ orang-orang Portugis datang ke Timor dua taun setelah menaklukkan Malaka pada tahun 1511”, kedatangan orang Portugis tidak mengubah dominasi politik dan setelah beberapa abad terjadi manipulasi politik, perdagangan, agama (kristenisasi) dan penggunaan kekerasan secara terang-terangan, hanya pada tahun 1912 Portugis dapat melakukan kontrol yang kuat terhadap sebagian besar bagian timur pulau, Donn Boaventura pimpinan penduduk asli Timor yang berakhir berkuasa ditundukan setelah hampir berkuasa selama dua puluh tahun memberontak. Pada abad ke 16 dan 17 tahta Portugis mendapatkan sedikit kekuasaan di Timur , yang secara teoritis dipimpin dari

goa oleh seorang raja muda, pada abad ke 18 terbentuklah pemerintahan di pulau Timor gubernur pertamanya adalah Antonio Coelho Guerreiro yang diangkat pada tahun 1701, dengan memulai strategi *de vide et impera* cara ini akan menjadi karakteristik kolonial Portugis sampai dua abad kemudian, dengan jalan menyogok, menawarkan jabatan militer kepada para kepala kampung, persekutuan secara licik dengan cara mengeksploitasi persaingan suku, Guerrero dapat menguasai satu persatu kekuasaan pemerintah penduduk asli (Horta, 1998: 28).

Sebelum munculnya pergolakan tahun 1974 memuat tentang peristiwa-peristiwa penting yang dimana menyusulnya terjadinya Revolusi Bunga di Portugal pada tahun 1974, kemudian terjadinya proses berintegrasinya Timor ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1976 dan menjadikan Timor Portugal sebagai Propinsi yang ke 27. Suasana di Timor di penggalan pertama tahun 1974 akan berubah menjadi kekacauan jika tidak terjadi kudeta militer di Ibu Kota Portugal Lisabon pada tanggal 25 April 1974, kudeta yang sering disebut sebagai Revolusi Bunga itu ternyata bukan hanya menggoncangkan negara Portugal secara keseluruhan tetapi juga dirasakan oleh kolonial-kolonialnya salah satu diantaranya adalah seperti yang dialami di Timor (Lapian, 1988: 26-27).

Dengan terjadinya Revolusi Bunga bagi rakyat Timor disambut dengan perasaan gembira dan terharu mendengarkan kesaksian mengisahkan tentang kegembiraan yang ditimbulkan oleh berbagai peristiwa di Lisbon dan berbagai wilayah jajahan lainnya di kalangan orang-orang muda yang tertarik politik. Tapi pada umumnya mereka juga setuju bahwa masyarakat Timor tidak siap karena sejarahnya untuk terlibat dalam kegiatan politik pada awal bulan Mei 1974, ketika Gubernur Alves Aldeia bertanya kepada Junta de Salvacao Nacional (JSN) di Lisbon untuk menjelaskan kebijakan kolonialnya yang baru, ia diinstruksikan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip program Movimento Forcas Armada (MFA) dan dengan mempertimbangkan berbagai kondisisetempat, berupaya

untuk tidak memperburuk hubungan dengan Indonesia (Tomodok, 1994: 77-78).

Adanya pergantian pemerintahan di Portugal sebagai hasil kudeta 25 April 1974 yang mempengaruhi perkembangan politik di daerah-daerah jajahannya, terutama dalam aspirasi politik untuk melepaskan diri dari ikatan penjajahan menuju kemerdekaan. Dalam konteks ini perubahan yang terjadi di Timor jelas akan mempunyai pengaruh terhadap keamanan nasional Indonesia terutama dalam arti terbukanya kemungkinan masuknya pengaruh atau kegiatan-kegiatan negara asing yang hendak menggarap Timor Timur dengan tujuan agar dalam perkembangannya berada dalam posisi yang menguntungkan strategi politik atau militernya. Oleh karena itu, lahirnya pemerintahan baru di Portugal yang juga membawa perubahan-perubahan konstelasi politik di Timor, oleh Indonesia juga dianggap sebagai sentakan untuk melancarkan bantuannya mempercepat proses pembebasan dan pengintegrasian Timor ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soekanto, 1976: 108).

Hak penentuan nasib sendiri untuk semua wilayah jajahan juga dicantumkan sebagai suatu kewajiban bagi negara Portugal dalam konstitusi tahun 1975, ketentuan ini terbukti menjadi penting dalam melanjutkan komitmen resmi Portugal atas penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur dalam tahun-tahun selanjutnya yang berat. Pembentukan partai-partai politik di Timor Timur mendengarkan kesaksian yang menggambarkan bagaimana Revolusi Bungasegera menggelorakan perhatian rakyat Timor Timur mengenai masa depan politik wilayah tersebut. Garis besar politik Portugal khususnya terhadap Timor Timur adalah melaksanakan dekolonisasi untuk maksud pemerintahan Portugis yang baru memberikan kelonggaran kepada rakyat Timor Timur untuk mendirikan partai-partai politik guna menyalurkan aspirasi mereka tentang bagaimana dekolonisasi itu harus dilaksanakan (Etan, 2006: 15).

Proses dekolonisasi itu dilakukan Portugis berdasarkan prinsip hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa jajahan (Resolusi Majelis Umum PBB 1514/1960). Sejalan dengan kebijakan tersebut, pada Mei 1974, Portugis menyatakan memberikan izin kepada rakyat Timor Timur untuk mendirikan partai-partai politik agar dapat menentukan masa depannya melalui referendum yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1975. Referendum tersebut meliputi tiga pilihan yaitu menjadi daerah otonomi dalam federasi dengan Portugal; menjadi negara bebas dan merdeka (sebagai bagian *commonwealth* Portugal atau tidak) dan terakhir bergabung dengan Republik Indonesia (Departemen Luar Negeri RI, 1982: 41).

Kebijakan Portugis tersebut disambut dengan pembentukan partai-partai yang masing-masing mempunyai aspirasinya sendiri. (Etan, 2006: 16-17) tiga partai tersebut adalah:

Pertama, Uni Demokratik Timor (*União Democrática Timorese*, UDT), yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1974. Para pendirinya cenderung konservatif secara politik dan banyak di antaranya memiliki hubungan dengan penguasa kolonial Portugis, yang mencerminkan keistimewaan status dan fungsi sosial mereka sebagai perantara antara orang-orang Timor dan penjajah Portugis. Presiden pertama UDT adalah Francisco Lopes da Cruz. Para pendiri yang lain yaitu César Augusto da Costa Mouzinho sebagai Wakil Presiden, Mário dan João Carrascalão, serta Domingos de Oliveira, Sekretaris Jenderal serikat tersebut. Manifesto awal UDT mengusulkan “otonomi progresif” di bawah Portugal, meskipun UDT juga mendukung hak untuk penentuan nasib sendiri. UDT mengumumkan perubahan posisinya pada tanggal 1 Agustus 1974 ketika menyatakan bahwa tujuan akhirnya adalah kemerdekaan setelah satu periode federasi dengan Portugal. UDT juga secara spesifik menolak integrasi dengan negara lain. Pergeseran UDT menunjukkan partai ini bisa berubah-ubah, dalam hal ini menanggapi perubahan dalam tatanan politik di Portugal dan kenyataan

bahwa nasionalisme merupakan kekuatan yang semakin berkembang di dalam Timor.

Kedua, Asosiasi Sosial Demokratik Timor (*Associação Social Democrata de Timor*, ASDT) atau FRETRELIN didirikan pada tanggal 20 Mei 1974. Para pendiri ASDT sebagian besar adalah pemuda Timor yang terpelajar, dari beragam latar belakang; beberapa dari dalam pemerintahan Portugis, yang lain dari kelompok bawah tanah anti penjajah pada awal tahun 1970-an. Karena lebih tua dan lebih dikenal ketimbang para pendiri asosiasi yang berusia muda, Francisco Xavier do Amaral diangkat sebagai Presiden. Para tokoh kunci yang lain termasuk Mári Alkatiri, José Ramos Horta, Nicolau Lobato dan Justino Mota. ASDT menerbitkan manifestonya pada tanggal 22 Mei, yang menegaskan hak untuk merdeka, dan sikap anti penjajahan. Asosiasi itu juga menyatakan komitmennya untuk suatu kebijakan “bertetangga baik” dengan negara-negara kawasan tanpa merugikan kepentingan rakyat Timor. Kemudian pada September 1975 berubah menjadi *Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente* (Front Revolusioner Timor Leste Merdeka, Fretelin) yang menginginkan kemerdekaan segera (Singh, 1996: 22-23).

Ketiga Asosiasi Rakyat Demokratik Timor (*Associação Popular Democrática Timorese*, Apodeti), yang didirikan pada tanggal 27 Mei 1974. Meskipun nama ini secara lugas dapat menjabarkan tujuan utama Apodeti, nama itu tampaknya dianggap terlalu transparan. Presiden pendiri asosiasi ini adalah Arnaldo dos Reis Araújo, tapi ahli strateginya adalah José Fernando Osório Soares, yang keluar dari ASDT untuk menjadi Sekretaris Jenderal Apodeti. Tokoh penting lain adalah pemilik perkebunan kopi, Hermenegildo Martins. *Liurai* Atsabe, Guilherme Maria Gonçalves, bergabung dengan Apodeti tidak lama setelah pembentukannya, dengan membawa pendukung yang berasal dari basis kekuasaan regionalnya (Horta, 1998: 47-50). Konsul Indonesia di Dili, Elias Tomodok, menjadi penghubung penting untuk saran dan dukungan keuangan bagi Apodeti

selama periode tahun 1974-75. Manifesto Apodeti menyatakan tujuan integrasi yang bersifat otonom dengan Indonesia, sesuai hukum internasional. Senada dengan dua partai besar yang lain, Apodeti mengutuk sejumlah keburukan dalam pemerintahan Portugis seperti korupsi dan diskriminasi, dan juga berjanji akan menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu.

Dengan terbentuknya organisasi-organisasi tersebut, untuk menentukan kedudukan Timor Timur dikemudian hari maka diadakan referendum dengan ketiga organisasi tersebut sebagai wadah pembawa aspirasi rakyat dan sebagai suatu kenyataan yang hidup untuk menentukan nasib sendiri (Soekanto, 1976: 380).

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas mengenai dinamika sosial politik Timor Timur pasca Revolusi Bunga, dimana sebelum terjadinya kudeta di Timor Timur mengalami penjajahan oleh bangsa Portugis dan mengalami kekacauan, kemudian muncul reaksi dalam perlawanan-perlawanan salah satu perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Portugis yang cukup besardan terorganisasi adalah Perlawanan Viqueque. Dengan adanya pergantian pemerintahan di Portugal sebagai hasil kudeta yang mempengaruhi perkembangan politik di daerah-daerah jajahannya, terutama dalam aspirasi politik untuk melepaskan diri dari ikatan penjajahan menuju kemerdekaan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana keadaan sosial politik di Timor Timur setelah berhasilnya kudeta atau Revolusi Bunga dilaksanakan.

Permasalahan tersebut membuat ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai sosial politik di Timor Timur pasca Revolusi Bunga. Berdasarkan permasalahan diatas kemudian penulis bermaksud mengangkat peristiwa tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul DAMPAK REVOLUSI BUNGA DI PORTUGAL TERHADAP DINAMIKA MASYARAKAT TIMOR PORTUGIS (1974-1976). Maksud yang terkandung pada judul di atas adalah Revolusi Bunga merupakan kudeta tak

berdarah untuk mengakhiri kediktatoran yang berjalan selama 50 tahun rezim Caetano yang terjadi atas pemerintahan sebelumnya yang bersifat otoriter, dan tidak demokratis di Portugal, tahun 1974 merupakan terjadinya Revolusi Bunga di bawah pimpinan Jendral De Spinoza terhadap pemerintahan Caetano, kemudian pada tahun 1976 merupakan berintegrasinya Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran di atas terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan pokoknya adalah bagaimana dampak Revolusi Bunga Terhadap Dinamika Masyarakat Timor Timur 1974-1976?

Sementara untuk membatasi kajian penelitian ini, maka diajukan beberapa pertanyaan sekaligus sebagai rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengapa terjadi Revolusi Bunga di Portugal ?
2. Bagaimana proses terjadinya Revolusi Bunga di Portugal 1974-1976?
3. Bagaimana dampak dari Revolusi Bunga di Portugal terhadap kehidupan masyarakat Timor Timur 1974-1976?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan ini antara lain:

1. Mendeskripsikan kondisi Timor Timur sebelum terjadi Revolusi Bunga.
2. Mendeskripsikan proses terjadinya Revolusi Bunga di Portugal 1974-1976.
3. Mendeskripsikan kondisi sosial politik Timor Timur pasca Revolusi Bunga 1974-1976.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti dapat mengaplikasikan teori-teori yang didapat dibangku perkuliahan.
2. Menambahkan penulisan sejarah Indonesia pada Masa Orde Baru.
3. Menambah kajian sejarah SMA kelas XII IPA semester 2 sesuai dengan Standar Kompetensi 3. Merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa Proklamasi sampai masa Reformasi, Kompetensi Dasar 3.1 merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru.

1.5 Struktur Organisasi

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah :

Bab I Pendahuluan, Bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang berisi gambaran umum mengenai permasalahan yang akan peneliti kaji, yaitu tentang pengaruh Revolusi Bunga terhadap dinamika sosial politik di Timor Portugis 1974-1976. Bab ini juga berisi perumusan dan pembatasan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan untuk mempermudah peneliti mengkaji dan mengarahkan pembahasan serta metode dan teknik penelitian sebagai cara untuk mendapatkan data dan fakta, dan terakhir sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teoretis, dalam bab ini akan diuraikan dan dikaji mengenai beberapa konsep dan teori yang relevan dengan tema penelitian, kajian pustaka ini digunakan penulis sebagai landasan berfikir dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan. Kemudian penulis akan mengemukakan penjelasan mengenai konsep-konsep yang relevan dengan tema yang akan diangkat, serta menyediakan suatu kerangka pemikiran yang mencakup beberapa teori yang akan dipakai dalam membuat analisis. Masih sedikit yang membahas lengkap sesuai dengan judul yang peneliti angkat, tetapi peneliti menggunakan referensi yang berhubungan dengan kajian yang akan diteliti sebagai kerangka dasar

berfikir bagi penulis untuk dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan dinamika sosial politik pasca revolusi bunga 1974-1976.

Bab III Metodologi Penelitian, Bab ini akan dibahas tentang langkah-langkah, metode dan teknik penelitian yang ditempuh oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian yaitu pencarian sumber, pengolahan sumber dengan menggunakan kritik eksternal dan internal, serta interpretasi berupa analisis fakta-fakta yang sudah didapat dan terakhir historiografi yaitu penulisan laporan penelitian.

BAB IV Dampak Revolusi Bunga di Portugal Terhadap Dinamika Masyarakat Timor Portugis (1974-1976), Bab ini memuat uraian penjelasan dan analisis dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini akan dibahas mengenai Dampak Revolusi Bunga Terhadap Dinamika Sosial Politik Timor Portugis 1974-1976. Selain itu, dalam bab ini akan dipaparkan pula beberapa analisis yang dapat mempermudah dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini.

Bab V Kesimpulan, Bab ini merupakan pembahasan terakhir dimana peneliti memberikan suatu kesimpulan dari hasil interpretasi terhadap jumlah masalah dalam penelitian. Interpretasi peneliti ini disertai dengan analisis peneliti dalam membuat kesimpulan atas jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam suatu rumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini juga berisikan saran dari peneliti yang diajukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam penelitian.